



Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) menandatangani nota kesepahaman tentang petunjuk teknis akses data sistem administrasi badan hukum dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham. Penandatanganan dilakukan Deputi Pencegahan KPK Iswan Elmi dan Dirjen AHU Aidir Amin Daud, dengan disaksikan Ketua KPK Abraham Samad, Jumat (23/11), di gedung KPK, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta.

Penandatanganan ini sebagai tindak lanjut nota kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani antara KPK dan Kemenkumham tentang Kerja Sama Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi, beberapa waktu lalu. "Terutama pasal 4 terkait pelaksanaan kegiatan pertukaran informasi dan/atau data, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya bisa lebih efektif, terukur, dan akuntabel," papar Abraham.

"KPK dan Kemenkumham merupakan mitra strategis dalam optimalisasi dan efektifitas pemberantasan korupsi sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok dan fungsi masing-masing berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku," lanjutnya.

Iswan Elmi menjelaskan bahwa secara teknis kesepakatan ini pada dasarnya merupakan upaya mempertajam pengumpulan alat-alat bukti yang diperlukan dalam pembuktian proses penanganan perkara di KPK. Dari segi pencegahan, lanjutnya, dengan kerja sama ini KPK dapat memperoleh verifikasi dari Dirjen AHU terkait kewajiban-kewajiban penyelenggara negara ataupun para pihak yang diperluas menurut ketentuan yang berlaku, seperti penyampaian laporan harta kekayaan (LHKPN). "Itu harus diverifikasi akurasinya, sehingga dengan kesepakatan ini akan mempercepat proses verifikasi data yang dilakukan oleh Kedeputusan Pencegahan KPK," imbuh Iswan.

Dirjen AHU Aidir Amin Daud menambahkan, dengan kerja sama ini KPK dapat setiap saat membuka semua data tentang perseroan terbatas (PT). "Jadi data perusahaan dapat dibuka oleh KPK langsung akses ke data Dirjen AHU dan bisa dibuka kapan dan di mana saja karena kita sudah memberikan akses tersebut, seperti password," papar Aidir.

Selain itu, lanjut Aidir, KPK juga bisa membuka semua data fisik yang ada di Kemenkumham yang berjumlah lebih dari 500.000 data tentang perseroan terbatas. "Sehingga upaya mencari kebenaran data dalam pemberantasan korupsi semakin lebih terbuka lagi," tandasnya.

(Humas)